



LAPORAN EVALUASI IMPLEMENTASI SPBE

“EVALUASI IMPLEMENTASI SPBE DALAM MENDUKUNG DIGITALISASI PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN TENGAH”

Disusun Oleh:

Nama	: IRWAN FELANI
NIP	: 199111102025061006
Jabatan	: PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA
Satuan Kerja	: KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TENGAH

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga laporan yang berjudul “**Evaluasi Implementasi SPBE dalam Mendukung Digitalisasi Pengelolaan Barang Milik Negara pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah**” ini dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai bagian dari pelaksanaan evaluasi implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada unit kerja, khususnya dalam mendukung proses digitalisasi pengelolaan Barang Milik Negara (BMN). Evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pemanfaatan teknologi dan sistem informasi telah mendukung proses pengelolaan BMN, serta mengidentifikasi berbagai kendala dan peluang perbaikan yang masih dapat dilakukan.

Dalam penyusunan laporan ini, penulis memperoleh banyak dukungan, arahan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh pegawai di lingkungan **Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah** yang telah memberikan dukungan dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan laporan ini.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan dan belum sepenuhnya sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan sebagai bahan perbaikan di masa yang akan datang. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan menjadi bahan evaluasi serta masukan dalam meningkatkan implementasi SPBE, khususnya dalam mendukung pengelolaan BMN yang lebih efektif, efisien, tertib, transparan, dan akuntabel.

Palangka Raya, 26 Agustus 2026

Penulis



Irwan Felani

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL/LAMPIRAN.....	iv
DAFTAR GAMBAR/LAMPIRAN	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud & Tujuan.....	2
1.2.1. Maksud	2
1.2.2. Tujuan	2
1.3 Ruang Lingkup	3
1.4 Dasar Hukum	3
BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN	5
2.1 Waktu dan Tempat Pelaksanaan	5
2.2 Metode Pelaksanaan	5
2.3 Tahapan Pelaksanaan Kegiatan	5
2.4 Pelaksanaan Kegiatan.....	6
BAB III EVALUASI IMPLEMENTASI SPBE	8
3.1. Gambaran Umum Implementasi SPBE.....	8
3.2. Evaluasi Pemanfaatan Sistem Elektronik Dalam Pengelolaan BMN....	8
3.3 Evaluasi Pengelolaan dan Kualitas Data BMN	10
3.4 Evaluasi Infrastruktur Teknologi Informasi.....	10
3.5 Evaluasi Sumber Daya Manusia	11
3.6 Evaluasi Keamanan Informasi	11
3.7 Identifikasi Kendala Implementasi SPBE	12
3.8 Hasil Evaluasi.....	13
BAB IV KESIMPULAN	14
BAB V REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT	15
5.1 Rekomendasi	15
5.2 Tindak Lanjut	16
BAB VI PENUTUP	18
LAMPIRAN	19

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Pemanfaatan Sistem/Aplikasi dalam Pengelolaan BMN.....	7
Tabel 3.1 Evaluasi Pemanfaatan Sistem Elektronik	9
Tabel 3.2 Identifikasi Kendala Implementasi SPBE.....	12
Tabel 5.1 Rekomendasi Perbaikan Implementasi SPBE.....	15
Tabel 5.2 Rencana Tindak Lanjut	17

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Tampilan Sistem Aplikasi SAKTI dalam Mendukung Pengelolaan BMN	9
Gambar 3.2 Tampilan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN)	10

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk dalam proses pengelolaan administrasi dan pelayanan di lingkungan instansi pemerintah. Pemanfaatan teknologi tidak lagi hanya menjadi pendukung pekerjaan, tetapi telah menjadi bagian penting dalam mewujudkan proses kerja pemerintahan yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Dalam konteks tersebut, penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menjadi salah satu upaya pemerintah untuk mendorong transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan.

SPBE merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Penerapan SPBE diharapkan mampu meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui pemanfaatan teknologi yang terintegrasi, sehingga proses kerja dapat dilakukan secara lebih cepat, tepat, terdokumentasi, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Salah satu aspek yang dapat didukung melalui implementasi SPBE adalah pengelolaan Barang Milik Negara (BMN). Pengelolaan BMN merupakan bagian penting dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah karena berkaitan dengan perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, penatausahaan, pengawasan, hingga penghapusan barang milik negara. Pengelolaan BMN yang tertib membutuhkan ketersediaan data yang akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses sesuai dengan kewenangan.

Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, proses pengelolaan BMN telah memanfaatkan berbagai sistem dan teknologi informasi dalam mendukung pelaksanaan tugas, salah satunya melalui penggunaan aplikasi SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi). Pemanfaatan sistem tersebut membantu proses pencatatan, penatausahaan, pelaporan, serta pengelolaan data BMN secara elektronik. Selain itu, penggunaan perangkat komputer, jaringan komunikasi data, dan media penyimpanan digital juga menjadi bagian dari pelaksanaan pekerjaan sehari-hari.

Meskipun demikian, penerapan SPBE dalam pengelolaan BMN masih menghadapi sejumlah tantangan. Pemanfaatan sistem digital belum sepenuhnya menghilangkan proses manual, terutama dalam kegiatan inventarisasi, pemeriksaan dokumen, pengumpulan data, serta pengelolaan beberapa dokumen pendukung. Kondisi tersebut dapat menyebabkan adanya pekerjaan yang dilakukan secara berulang, perbedaan antara data pada sistem

dengan kondisi fisik apabila tidak dilakukan pemutakhiran secara berkala, serta membutuhkan koordinasi yang lebih intensif antarpegawai maupun antarunit kerja.

Selain aspek sistem, keberhasilan implementasi SPBE juga dipengaruhi oleh kesiapan sumber daya manusia, ketersediaan infrastruktur teknologi informasi, kualitas data, keamanan informasi, serta kemampuan unit kerja dalam menyesuaikan proses bisnis dengan pemanfaatan teknologi. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi untuk mengetahui kondisi implementasi SPBE pada unit kerja, khususnya dalam mendukung digitalisasi pengelolaan BMN.

Berdasarkan kondisi tersebut, evaluasi implementasi SPBE pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah menjadi penting untuk dilakukan. Evaluasi ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan BMN, mengidentifikasi berbagai permasalahan dan kesenjangan yang masih terdapat dalam pelaksanaannya, serta menghasilkan rekomendasi yang dapat digunakan sebagai bahan perbaikan.

Dengan demikian, implementasi SPBE diharapkan tidak hanya berorientasi pada penggunaan aplikasi atau teknologi, tetapi juga mampu mendorong perubahan proses kerja menjadi lebih efektif, efisien, terintegrasi, tertib administrasi, serta mendukung terwujudnya pengelolaan BMN yang lebih transparan dan akuntabel di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

1.2.1 Maksud

Penyusunan laporan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, khususnya dalam mendukung proses digitalisasi pengelolaan Barang Milik Negara (BMN).

Laporan ini juga dimaksudkan sebagai bahan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan pengelolaan BMN, sehingga dapat diketahui kondisi penerapannya serta aspek-aspek yang masih perlu ditingkatkan.

1.2.2 Tujuan

Adapun tujuan penyusunan laporan ini adalah:

1. Mengetahui kondisi implementasi SPBE pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, khususnya dalam mendukung pengelolaan BMN.
2. Mengidentifikasi pemanfaatan teknologi informasi dan sistem elektronik dalam proses perencanaan, pencatatan, penatausahaan, pelaporan, serta pengawasan BMN.

3. Mengidentifikasi kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan SPBE pada proses pengelolaan BMN.
4. Menilai efektivitas pemanfaatan sistem digital dalam mendukung tertib administrasi, akurasi data, efisiensi pekerjaan, dan ketersediaan informasi BMN.
5. Merumuskan rekomendasi perbaikan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan implementasi SPBE dan digitalisasi pengelolaan BMN di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah.
6. Mendukung peningkatan tata kelola BMN yang lebih efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan kebutuhan transformasi digital pemerintahan.

1.3 RUANG LINGKUP

Laporan ini membahas penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam mendukung digitalisasi pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah. Pembahasan difokuskan pada pemanfaatan sistem dan teknologi informasi dalam mendukung proses pengelolaan BMN, mulai dari perencanaan kebutuhan, pengadaan, pencatatan, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pengawasan dan pengendalian BMN.

Evaluasi mencakup pemanfaatan aplikasi yang digunakan dalam pengelolaan BMN, khususnya SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi) dan SIMAN (Sistem Informasi Manajemen Aset Negara). Pembahasan diarahkan untuk melihat bagaimana kedua sistem tersebut mendukung proses administrasi dan penatausahaan BMN, pengelolaan data aset, pemutakhiran informasi, penyusunan laporan, serta pelaksanaan monitoring dan pengendalian BMN. Selain itu, evaluasi juga mempertimbangkan aspek sumber daya manusia, ketersediaan perangkat dan jaringan, serta kemampuan pegawai dalam memanfaatkan sistem elektronik tersebut.

Ruang lingkup laporan juga mencakup identifikasi kendala dan permasalahan dalam penerapan SPBE pada pengelolaan BMN, baik yang berkaitan dengan sistem aplikasi, integrasi dan konsistensi data, sumber daya manusia, infrastruktur, maupun proses kerja. Hasil evaluasi tersebut selanjutnya digunakan sebagai dasar untuk menyusun rekomendasi perbaikan guna meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan BMN sehingga dapat terlaksana secara lebih efektif, efisien, tertib, transparan, dan akuntabel.

1.4 DASAR HUKUM

- a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

- b. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
- c. Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 249);
- d. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250);
- e. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Penggunaan Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 346);
- f. Peraturan Presiden No 95 Tahun 2018 tentang SPBE;
- g. Peraturan Menteri Hukum No. 35 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Kementerian Hukum;
- h. Peraturan Menteri Pendayaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2026 tentang Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital.

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

2.1 WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

Kegiatan evaluasi implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam mendukung digitalisasi pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dilaksanakan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah selama bulan Agustus 2026.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada lingkungan kerja yang melaksanakan fungsi pengelolaan dan penatausahaan BMN. Kegiatan evaluasi dilaksanakan melalui pengamatan terhadap proses kerja, penggunaan sistem elektronik, serta pelaksanaan administrasi dan pengelolaan data BMN yang berjalan pada unit kerja.

2.2 METODE PELAKSANAAN

Evaluasi implementasi SPBE dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif melalui pengamatan terhadap pelaksanaan pekerjaan dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan BMN. Evaluasi diarahkan untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi penerapan SPBE secara nyata pada proses kerja sehari-hari.

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan meliputi observasi, identifikasi, dan analisis terhadap proses pengelolaan BMN yang telah memanfaatkan sistem elektronik. Observasi dilakukan terhadap penggunaan aplikasi dan sarana teknologi informasi, sedangkan identifikasi dilakukan untuk mengetahui proses, data, sumber daya, serta kendala yang terdapat dalam pelaksanaan pengelolaan BMN.

Selanjutnya, hasil pengamatan dan identifikasi dianalisis untuk melihat tingkat pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pengelolaan BMN serta mengidentifikasi aspek yang masih memerlukan perbaikan. Hasil analisis tersebut digunakan sebagai dasar dalam penyusunan rekomendasi peningkatan implementasi SPBE pada unit kerja.

2.3 TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan evaluasi dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahap pertama adalah persiapan, yaitu menentukan fokus evaluasi, mengidentifikasi proses pengelolaan BMN yang akan dievaluasi, serta mengumpulkan informasi mengenai sistem dan aplikasi yang digunakan pada unit kerja.

Tahap kedua adalah pengumpulan data dan informasi melalui pengamatan terhadap proses pengelolaan BMN serta penggunaan sistem elektronik, khususnya SAKTI (Sistem

Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi) dan SIMAN (Sistem Informasi Manajemen Aset Negara). Pengamatan juga dilakukan terhadap penggunaan perangkat komputer, jaringan, dokumen digital, serta mekanisme pengelolaan dan pemutakhiran data BMN.

Tahap ketiga adalah identifikasi dan analisis, yaitu mengidentifikasi kondisi penerapan SPBE, manfaat penggunaan sistem elektronik, kendala yang dihadapi, serta aspek-aspek yang masih dapat ditingkatkan. Analisis dilakukan dengan membandingkan kondisi pelaksanaan di unit kerja dengan kebutuhan pengelolaan BMN yang efektif, efisien, tertib, dan terdokumentasi.

Tahap terakhir adalah penyusunan hasil evaluasi dan rekomendasi. Berdasarkan hasil pengamatan dan analisis, disusun gambaran mengenai kondisi implementasi SPBE dalam pengelolaan BMN serta rekomendasi perbaikan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dan kualitas pengelolaan BMN pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah.

2.4 PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan evaluasi dilakukan dengan mengamati proses pengelolaan BMN yang berlangsung pada unit kerja, mulai dari kegiatan administrasi, pencatatan dan penatausahaan, pemutakhiran data, hingga penyusunan dan penyampaian laporan. Dalam pelaksanaannya, teknologi informasi telah digunakan sebagai bagian dari proses kerja untuk mendukung pengelolaan data dan informasi BMN.

Aplikasi SAKTI dimanfaatkan dalam mendukung proses pengelolaan keuangan dan BMN secara elektronik, sedangkan SIMAN digunakan sebagai salah satu sistem yang mendukung pengelolaan dan penatausahaan aset negara. Penggunaan kedua sistem tersebut menjadi bagian penting dalam proses digitalisasi pengelolaan BMN karena membantu penyediaan data dan informasi aset secara lebih terstruktur serta mendukung proses administrasi dan pelaporan.

Selain penggunaan aplikasi, pelaksanaan kegiatan juga memperhatikan kesiapan perangkat teknologi informasi, jaringan komunikasi data, sumber daya manusia, serta proses kerja yang berkaitan dengan pengelolaan BMN. Pengamatan terhadap aspek-aspek tersebut dilakukan untuk memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh mengenai implementasi SPBE pada pengelolaan BMN di unit kerja.

Tabel 2.1 Pemanfaatan Sistem/Aplikasi dalam Pengelolaan BMN

No.	Sistem/Aplikasi	Fungsi dalam Pengelolaan BMN	Pemanfaatan
1	SAKTI	Mendukung pencatatan, penatausahaan, transaksi, dan pelaporan BMN	Digunakan
2	SIMAN	Mendukung pengelolaan, penatausahaan, dan informasi aset negara	Digunakan

Berdasarkan pemanfaatan sistem tersebut, dapat dilihat bahwa proses pengelolaan BMN pada unit kerja telah memanfaatkan teknologi informasi sebagai bagian dari pelaksanaan pekerjaan. Penggunaan sistem elektronik membantu proses pencatatan, pengelolaan data, dan penyediaan informasi BMN secara lebih terstruktur.

BAB III

EVALUASI IMPLEMENTASI SPBE

3.1 GAMBARAN UMUM IMPLEMENTASI SPBE

Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah telah diterapkan dalam berbagai proses pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan. Pemanfaatan teknologi informasi dilakukan untuk mendukung proses administrasi, pengelolaan data, komunikasi, pelaporan, serta pelaksanaan pekerjaan pada unit kerja.

Dalam pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), penerapan SPBE terlihat dari penggunaan sistem elektronik dalam mendukung proses pencatatan, penatausahaan, pengelolaan, pemutakhiran data, dan pelaporan BMN. Penggunaan aplikasi SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi) dan SIMAN (Sistem Informasi Manajemen Aset Negara) menjadi bagian penting dalam pelaksanaan digitalisasi pengelolaan BMN.

Pemanfaatan sistem tersebut memberikan kemudahan dalam pengelolaan data dibandingkan dengan proses yang sepenuhnya dilakukan secara manual. Data dapat dicatat dan diperbarui melalui sistem, dokumen dapat dikelola dalam bentuk elektronik, serta informasi BMN dapat digunakan sebagai bahan pendukung dalam pelaksanaan administrasi dan pelaporan.

3.2 EVALUASI PEMANFAATAN SISTEM ELEKTRONIK DALAM PENGELOLAAN BMN

Pemanfaatan sistem elektronik dalam pengelolaan BMN pada unit kerja telah memberikan dukungan terhadap pelaksanaan penatausahaan dan pengelolaan aset. Sistem digunakan untuk membantu proses pencatatan transaksi BMN, pengelolaan data aset, pemutakhiran informasi, serta penyusunan laporan yang berkaitan dengan BMN.

SAKTI digunakan untuk mendukung pengelolaan keuangan dan BMN dalam satu sistem aplikasi. Pemanfaatannya membantu proses pencatatan transaksi dan penatausahaan BMN serta menyediakan data yang menjadi bagian dari pelaporan keuangan dan BMN. Dengan adanya sistem tersebut, proses pengelolaan data menjadi lebih terstruktur dan terdokumentasi.

Sementara itu, SIMAN digunakan sebagai sistem pendukung dalam pengelolaan dan penatausahaan aset negara. Pemanfaatan SIMAN membantu dalam pengelolaan informasi aset, pemutakhiran data, serta pelaksanaan proses administrasi dan pengawasan BMN sesuai dengan kebutuhan pengelolaan aset negara.

Meskipun demikian, penggunaan beberapa sistem dalam pengelolaan BMN juga memerlukan ketelitian dalam melakukan pemutakhiran dan pencocokan data. Perbedaan waktu pembaruan atau proses administrasi pada masing-masing sistem dapat menyebabkan perlunya pengecekan dan rekonsiliasi agar data yang digunakan tetap konsisten dan sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Tabel 3.1 Evaluasi Pemanfaatan Sistem Elektronik

No.	Aspek yang Dievaluasi	Kondisi Saat Ini	Hasil Evaluasi
1	Pemanfaatan SAKTI	Digunakan dalam pengelolaan dan penatausahaan BMN	Sudah diterapkan
2	Pemanfaatan SIMAN	Digunakan dalam pengelolaan dan penatausahaan aset	Sudah diterapkan
3	Pemutakhiran data	Dilakukan sesuai kebutuhan dan periode pengelolaan	Perlu ditingkatkan
4	Konsistensi data	Memerlukan pencocokan dan rekonsiliasi	Perlu diperhatikan
5	Pelaporan	Didukung oleh sistem elektronik	diterapkan

Berdasarkan tabel tersebut, pemanfaatan sistem elektronik dalam pengelolaan BMN telah berjalan dan memberikan dukungan terhadap pelaksanaan pekerjaan. Namun, masih diperlukan perhatian terhadap pemutakhiran dan konsistensi data, terutama dalam memastikan kesesuaian informasi pada sistem dengan dokumen administrasi dan kondisi fisik BMN.

Gambar 3.1 Tampilan Sistem Aplikasi SAKTI dalam Mendukung Pengelolaan BMN



Gambar 3.2 Tampilan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN)



3.3 EVALUASI PENGELOLAAN DAN KUALITAS DATA BMN

Data merupakan salah satu komponen penting dalam implementasi SPBE. Dalam pengelolaan BMN, kualitas data sangat menentukan ketepatan informasi yang digunakan untuk pengambilan keputusan, pelaporan, pengawasan, maupun perencanaan kebutuhan barang.

Pemanfaatan SAKTI dan SIMAN telah membantu menyediakan data BMN dalam bentuk elektronik sehingga informasi aset dapat dikelola secara lebih terstruktur. Namun, kualitas data tetap sangat bergantung pada ketepatan proses input, kelengkapan dokumen pendukung, serta kedisiplinan dalam melakukan pemutakhiran data.

Selain data yang terdapat pada sistem, kondisi fisik BMN dan dokumen administrasi juga perlu diperhatikan. Oleh karena itu, proses inventarisasi, pemeriksaan fisik, pencocokan data, dan rekonsiliasi masih menjadi bagian penting dalam memastikan kesesuaian antara data elektronik dengan kondisi BMN yang sebenarnya.

Berdasarkan hasil evaluasi, penerapan sistem elektronik telah membantu meningkatkan ketersediaan dan kemudahan akses terhadap informasi BMN. Namun, masih diperlukan upaya berkelanjutan untuk menjaga konsistensi, kelengkapan, dan kemutakhiran data agar digitalisasi pengelolaan BMN dapat memberikan hasil yang optimal.

3.4 EVALUASI INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI INFORMASI

Implementasi SPBE dalam pengelolaan BMN membutuhkan dukungan infrastruktur teknologi informasi yang memadai. Infrastruktur tersebut meliputi perangkat komputer,

jaringan internet atau jaringan komunikasi data, serta perangkat pendukung lainnya yang digunakan untuk mengakses dan mengoperasikan sistem elektronik.

Pada pelaksanaannya, perangkat komputer dan jaringan telah dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan pengelolaan BMN serta akses terhadap aplikasi SAKTI dan SIMAN. Ketersediaan infrastruktur tersebut memungkinkan pekerjaan administrasi dan pengelolaan data dilakukan secara elektronik sehingga dapat mengurangi ketergantungan terhadap dokumen dan proses manual.

Namun demikian, keberlangsungan penggunaan sistem elektronik tetap bergantung pada kondisi perangkat dan jaringan. Gangguan jaringan, keterbatasan perangkat, maupun permasalahan teknis dapat mempengaruhi kelancaran pekerjaan. Oleh karena itu, pemeliharaan perangkat dan peningkatan kualitas infrastruktur perlu dilakukan secara berkala untuk menjaga keberlangsungan layanan SPBE.

3.5 EVALUASI SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting dalam keberhasilan implementasi SPBE. Penggunaan sistem elektronik tidak hanya bergantung pada ketersediaan aplikasi dan infrastruktur, tetapi juga pada kemampuan pegawai dalam memahami dan mengoperasikan sistem yang digunakan.

Dalam pengelolaan BMN, pegawai yang terlibat telah menggunakan aplikasi SAKTI dan SIMAN sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Pengalaman dalam melaksanakan pekerjaan secara elektronik membantu pegawai dalam menyesuaikan proses administrasi BMN dengan penggunaan sistem informasi.

Meskipun demikian, perubahan dan perkembangan sistem aplikasi membutuhkan kemampuan pegawai untuk terus menyesuaikan diri. Peningkatan kompetensi melalui pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, maupun pembelajaran mandiri diperlukan agar pemanfaatan sistem dapat dilakukan secara optimal dan meminimalkan kesalahan dalam pengelolaan data.

3.6 EVALUASI KEAMANAN INFORMASI

Pengelolaan BMN secara elektronik menghasilkan data dan informasi yang perlu dijaga keamanan serta penggunaannya sesuai dengan kewenangan. Oleh karena itu, aspek keamanan informasi menjadi bagian penting dalam implementasi SPBE.

Penggunaan sistem seperti SAKTI dan SIMAN pada dasarnya telah menerapkan mekanisme akses berdasarkan akun dan kewenangan pengguna. Hal tersebut membantu membatasi akses terhadap data dan fungsi tertentu sesuai dengan tugas masing-masing pengguna.

Pada tingkat unit kerja, keamanan informasi juga perlu didukung dengan kedisiplinan pegawai dalam menjaga akun dan kata sandi, membatasi akses terhadap dokumen, melakukan pencadangan data apabila diperlukan, serta menghindari penggunaan data dan dokumen kedinasan secara sembarangan. Kesadaran pengguna menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga keamanan informasi dalam pelaksanaan SPBE.

3.7 IDENTIFIKASI KENDALA IMPLEMENTASI SPBE

Berdasarkan hasil evaluasi, implementasi SPBE dalam mendukung digitalisasi pengelolaan BMN telah memberikan manfaat dalam pelaksanaan pekerjaan, namun masih terdapat beberapa kendala yang perlu menjadi perhatian.

Kendala tersebut antara lain adanya kebutuhan untuk melakukan pencocokan dan rekonsiliasi data pada beberapa sistem, ketergantungan terhadap ketersediaan jaringan dan perangkat teknologi informasi, serta kebutuhan peningkatan kompetensi pengguna dalam mengikuti perkembangan aplikasi dan prosedur digital.

Selain itu, sebagian proses kerja masih memerlukan dokumen pendukung dan pemeriksaan secara manual. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi pengelolaan BMN belum sepenuhnya menghilangkan proses manual, sehingga masih terdapat peluang untuk meningkatkan efisiensi melalui penyederhanaan proses, pengelolaan dokumen secara elektronik, dan peningkatan integrasi data.

Tabel 3.2 Identifikasi Kendala Implementasi SPBE

No.	Kendala	Dampak terhadap Pengelolaan BMN	Prioritas
1	Pemutakhiran data membutuhkan ketelitian	Risiko adanya perbedaan data	Tinggi
2	Data perlu dicocokkan antar sistem	Membutuhkan waktu tambahan	Tinggi
3	Masih terdapat proses manual	Efisiensi pekerjaan belum optimal	Sedang
4	Ketergantungan terhadap jaringan	Dapat menghambat akses sistem	Sedang
5	Kemampuan pengguna tidak selalu sama	Risiko kesalahan penggunaan sistem	Sedang
6	Pengelolaan dokumen masih membutuhkan penataan	Pencarian dokumen dapat membutuhkan waktu	Sedang

Berdasarkan identifikasi tersebut, kendala utama dalam implementasi SPBE pada pengelolaan BMN tidak hanya berkaitan dengan aplikasi, tetapi juga mencakup aspek data, proses kerja, sumber daya manusia, dan infrastruktur. Oleh karena itu, peningkatan

implementasi SPBE perlu dilakukan secara menyeluruh dan tidak hanya berfokus pada penggunaan aplikasi.

3.8 HASIL EVALUASI

Secara umum, implementasi SPBE pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, khususnya dalam pengelolaan BMN, telah berjalan dan memberikan dukungan terhadap pelaksanaan tugas. Pemanfaatan SAKTI dan SIMAN menunjukkan bahwa proses pengelolaan BMN telah memanfaatkan teknologi informasi sebagai bagian dari proses kerja.

Implementasi tersebut memberikan beberapa manfaat, antara lain meningkatkan keteraturan pencatatan data, mempermudah pengelolaan dan pencarian informasi, mendukung penyusunan laporan, serta membantu proses pengawasan dan pengendalian BMN.

Namun demikian, masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan, terutama dalam hal konsistensi dan pemutakhiran data, integrasi proses, kompetensi pengguna, kesiapan infrastruktur, serta pengurangan proses manual. Dengan melakukan perbaikan secara bertahap terhadap aspek-aspek tersebut, implementasi SPBE diharapkan dapat semakin mendukung pengelolaan BMN yang efektif, efisien, tertib, transparan, dan akuntabel.

BAB IV

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil evaluasi implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam mendukung digitalisasi pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, dapat disimpulkan bahwa penerapan SPBE telah memberikan dukungan yang cukup baik terhadap pelaksanaan pengelolaan BMN. Pemanfaatan teknologi informasi melalui SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi) dan SIMAN (Sistem Informasi Manajemen Aset Negara) telah membantu proses pencatatan, penatausahaan, pemutakhiran data, pengelolaan informasi, serta pelaporan BMN secara elektronik.

Penerapan sistem elektronik juga memberikan manfaat dalam meningkatkan keteraturan administrasi, mempermudah akses terhadap data dan informasi BMN, serta mendukung proses monitoring dan pengendalian aset. Dengan adanya pemanfaatan sistem tersebut, proses pengelolaan BMN menjadi lebih terdokumentasi dan mengurangi ketergantungan terhadap proses administrasi yang sepenuhnya dilakukan secara manual.

Namun demikian, hasil evaluasi menunjukkan bahwa implementasi SPBE dalam pengelolaan BMN masih perlu ditingkatkan. Beberapa aspek yang perlu mendapat perhatian antara lain konsistensi dan pemutakhiran data, proses pencocokan dan rekonsiliasi antar sistem, ketersediaan infrastruktur, kompetensi sumber daya manusia, keamanan informasi, serta masih adanya beberapa proses manual yang mendukung pelaksanaan administrasi BMN.

Dengan demikian, implementasi SPBE dalam pengelolaan BMN di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah telah memberikan dasar yang baik bagi pelaksanaan transformasi digital, namun masih diperlukan perbaikan dan pengembangan secara berkelanjutan. Optimalisasi pemanfaatan sistem, peningkatan kompetensi pegawai, penguatan infrastruktur, serta peningkatan kualitas dan konsistensi data diharapkan dapat mewujudkan pengelolaan BMN yang semakin efektif, efisien, tertib, transparan, dan akuntabel.

BAB V

REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT

5.1 REKOMENDASI

Berdasarkan hasil evaluasi implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam mendukung digitalisasi pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), terdapat beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penerapan SPBE pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah.

1. Meningkatkan konsistensi dan pemutakhiran data BMN secara berkala agar data pada sistem elektronik selalu sesuai dengan kondisi fisik dan dokumen administrasi yang tersedia.
2. Mengoptimalkan pemanfaatan SAKTI dan SIMAN sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing, serta meningkatkan koordinasi dalam proses pencatatan, pemutakhiran, dan rekonsiliasi data untuk meminimalkan perbedaan informasi antar sistem.
3. Mengurangi proses administrasi manual secara bertahap melalui pemanfaatan dokumen elektronik, penyimpanan dokumen secara terstruktur, dan digitalisasi proses kerja yang masih dilakukan secara manual.
4. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis, dan pembelajaran secara berkala terkait penggunaan aplikasi serta perkembangan kebijakan dan prosedur pengelolaan BMN secara digital.
5. Meningkatkan kesiapan dan pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi, terutama perangkat komputer dan jaringan yang digunakan untuk mendukung akses terhadap sistem pengelolaan BMN.
6. Memperkuat penerapan keamanan informasi dengan meningkatkan kesadaran pegawai dalam menjaga akun pengguna, kata sandi, dokumen, dan data BMN serta memastikan akses sistem diberikan sesuai dengan tugas dan kewenangan.

Tabel 5.1 Rekomendasi Perbaikan Implementasi SPBE

No.	Permasalahan	Rekomendasi
1	Pemutakhiran data belum optimal	Melakukan pemutakhiran dan rekonsiliasi data secara berkala
2	Data perlu dicocokkan antar sistem	Meningkatkan koordinasi dan pemeriksaan kesesuaian data

3	Masih terdapat proses manual	Melakukan digitalisasi dokumen dan proses administrasi
4	Kompetensi pengguna perlu ditingkatkan	Melaksanakan pelatihan dan bimbingan teknis
5	Infrastruktur perlu dipelihara	Melakukan pemeriksaan dan pemeliharaan perangkat serta jaringan
6	Keamanan informasi perlu diperkuat	Meningkatkan kesadaran keamanan dan pengelolaan akses

5.2 TINDAK LANJUT

Sebagai tindak lanjut atas hasil evaluasi, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah dapat melakukan perbaikan secara bertahap dan berkelanjutan dengan melibatkan pegawai yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan BMN serta pengelolaan teknologi informasi.

Tindak lanjut yang dapat dilakukan antara lain melaksanakan pemutakhiran dan rekonsiliasi data BMN secara berkala, melakukan pemeriksaan kesesuaian antara data pada SAKTI, SIMAN, dokumen administrasi, dan kondisi fisik BMN, serta melakukan identifikasi terhadap data yang belum lengkap atau memerlukan perbaikan.

Selain itu, perlu dilakukan evaluasi secara berkala terhadap penggunaan sistem dan infrastruktur teknologi informasi untuk memastikan aplikasi dapat digunakan dengan baik dan kebutuhan perangkat serta jaringan dapat terpenuhi. Pegawai juga perlu diberikan kesempatan untuk mengikuti pelatihan atau bimbingan teknis apabila terdapat perubahan sistem, prosedur, maupun kebijakan terkait pengelolaan BMN.

Dalam jangka menengah, unit kerja dapat mendorong digitalisasi dokumen dan proses administrasi BMN secara lebih terstruktur. Dokumen elektronik dapat dikelola dengan sistem penyimpanan yang tertata sehingga memudahkan pencarian, penggunaan kembali, serta pengawasan terhadap dokumen.

Melalui pelaksanaan tindak lanjut tersebut, diharapkan hasil evaluasi tidak hanya menjadi bahan dokumentasi, tetapi dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan nyata dalam penyelenggaraan SPBE. Dengan perbaikan yang dilakukan secara berkelanjutan, digitalisasi pengelolaan BMN diharapkan dapat semakin mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah secara efektif, efisien, tertib, transparan, dan akuntabel.

Tabel 5.2 Rencana Tindak Lanjut

No.	Tindak Lanjut	Pelaksanaan	Output yang Diharapkan
1	Pemutakhiran data BMN	Dilakukan secara berkala	Data BMN lebih akurat dan mutakhir
2	Rekonsiliasi data SAKTI dan SIMAN	Dilakukan sesuai kebutuhan/periode	Data lebih konsisten
3	Digitalisasi dokumen BMN	Dilakukan secara bertahap	Dokumen lebih mudah disimpan dan dicari
4	Peningkatan kompetensi pegawai	Pelatihan/bimbingan teknis	Kemampuan pengguna meningkat
5	Pemeliharaan perangkat dan jaringan	Pemeriksaan berkala	Sistem dapat digunakan secara optimal
6	Penguatan keamanan informasi	Penerapan disiplin akses dan pengamanan akun	Keamanan data lebih terjaga

Tindak lanjut tersebut diharapkan dapat dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan unit kerja. Pelaksanaan tindak lanjut juga perlu dievaluasi secara berkala untuk mengetahui efektivitas perbaikan yang telah dilakukan.

BAB VI

PENUTUP

Laporan evaluasi implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam mendukung digitalisasi pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah disusun sebagai gambaran mengenai kondisi pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan pengelolaan BMN di unit kerja.

Berdasarkan hasil evaluasi, pemanfaatan sistem elektronik seperti SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi) dan SIMAN (Sistem Informasi Manajemen Aset Negara) telah memberikan dukungan terhadap proses pencatatan, penatausahaan, pemutakhiran data, pelaporan, serta pengawasan BMN. Implementasi SPBE juga telah membantu meningkatkan keteraturan administrasi dan mempermudah pengelolaan informasi BMN.

Namun demikian, penerapan SPBE masih perlu dikembangkan secara berkelanjutan, terutama dalam peningkatan kualitas dan konsistensi data, pengurangan proses manual, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, penguatan infrastruktur teknologi informasi, serta penerapan keamanan informasi. Perbaikan pada aspek-aspek tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan BMN.

Pada akhirnya, implementasi SPBE bukan hanya berkaitan dengan penggunaan aplikasi dan teknologi, tetapi juga mencakup perubahan pola kerja, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pengelolaan data dan informasi yang lebih baik. Oleh karena itu, diperlukan komitmen dan kerja sama seluruh pihak agar penerapan SPBE dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang optimal bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah.

LAMPIRAN / DOKUMENTASI

1. Tampilan daftar/data BMN

ID	No	Kode Subsat	Kode Barang	MRP	Nama Subsat	Nama Barang
1	1	13011400002000000	20101001	1	KAWAL KEMERUKAL KALTENG (SETJEN)	Tanah Bang
2	2	13011400002000000	20101001	2	KAWAL KEMERUKAL KALTENG (SETJEN)	Tanah Bang
3	3	13011400002000000	20101001	3	KAWAL KEMERUKAL KALTENG (SETJEN)	Tanah Bang
4	4	13011400002000000	20101001	4	KAWAL KEMERUKAL KALTENG (SETJEN)	Tanah Bang
5	5	13011400002000000	20101002	5	KAWAL KEMERUKAL KALTENG (SETJEN)	Tanah Bang
6	6	13011400002000000	20101001	6	KAWAL KEMERUKAL KALTENG (SETJEN)	Tanah Bang
7	7	13011400002000000	20101000	7	KAWAL KEMERUKAL KALTENG (SETJEN)	Tanah Bang
8	8	13011400002000000	20101000	8	KAWAL KEMERUKAL KALTENG (SETJEN)	Tanah Bang
9	9	13011400002000000	20101000	9	KAWAL KEMERUKAL KALTENG (SETJEN)	Tanah Bang
10	10	13011400002000000	20101001	1	KAWAL KEMERUKAL KALTENG (SETJEN)	Transportasi

2. Tampilan informasi/detail aset

Detail BMN

Lokasi

Alamat: Jl. Adnan Tambak

Kecamatan: KALAMATIKA TENGAH

Kabupaten/Kota: KOTA PALANGKARAGA

Kacamatan: Palangkar

Kecamatan/Kota: Palangkar

Kode Pos: 73111

Alamat Lain: Jl. Adnan Tambak

Alamat Lengkap: Jl. Adnan Tambak, Palangkar, KOTA PALANGKARAGA, KALAMATIKA TENGAH, TOTT

Luas Bangunan (m²)

Luas Bangunan: 3750

Luas Dasar Bangunan: 3750

Luas Persegi Panjang Persegi Panjang (m²): 0

Luas Persegi Panjang Persegi Panjang (m²): 0

Jumlah Lantai: 3

Kuantitas: 1

Pengadaan

No Sumber Dana: 08-86-2002

Tanggal Sumber Dana: 08-06-2002

Asal Pembiayaan: Dana Pembiayaan

Pembiayaan Asas Tetap: 39-12-2016

Tanggal Pembiayaan: 39-12-2016

Nilai (Dalam Rupiah)

Nilai Persegi Panjang: 21.723.191.400

Nilai Mula: 622.000

Nilai Persegi Panjang: 21.723.813.400

3. Transaksi Persediaan (Aplikasi Sakti)

[illegible]

